

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I, TW II, TW III, TW IV				Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Anggaran	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja	TW I	TW II	TW III					TW IV
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Menyusun Kebijakan dan Pedoman Penyusunan APBD					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD/APBD-P, Penatausahaan dan Penyampaian LKPD	Tepat Waktu (sesuai ketentuan)	1.207.266.523.273
		Penyampaian RAPBD ke DPRD			60 hari sebelum 1 bulan T.A Berakhir		menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan meliputi penganggaran dan Pengelolaan keuangan daerah								
		Penyampaian RAPBD-P ke DPRD			5 Minggu ke II September		memfasilitasi seluruh proses berlangsungnya koordinasi, harmonisasi dan supervisi penyusunan, KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
		Penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi			3 hari setelah persetujuan bersama		menyelenggarakan koordinasi dengan DPRD serta Kementerian dalam Negeri terkait APBD dan pengelolaan keuangan daerah.								
		Penyampaian Perda APBD/APBD-P ke Mendagri			7 hari setelah PERDA di tetapkan										
		Tepat waktu penatausahaan Keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD melalui Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah					Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	3.049.757.200
		Penerbitan SPD	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah (Kementerian Dalam negeri dan kementerian keuangan) serta stakeholder terkait lainnya.								
		Penerbitan SP2D	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP									
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai Ketentuan PP/PMK	Sesuai Ketentuan PP/PMK	Sesuai Ketentuan PP/PMK	Sesuai Ketentuan PP/PMK									
		Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah yang akuntabel untuk penyusunan Laporan keuangan Daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.								
		Penyampaian LKPD ke BPK			3 bulan setelah berakhirnya T.A										
		Persentase Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD, APBD-P Kab/Kota yang di evaluasi Tepat Waktu		100%	100%	100%	Melaksanakan Evaluasi APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan					Pembinaan Pengelolaan Keuda Kab/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kualitas APBD Kab/Kota Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuda	100%	886.228.800 578.174.720
							Memberikan Pembinaan kepada Kab/Kota secara berkala terkait kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.					Koordinasi dan pelaksanaan Keuda Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan pelaporan Keuda	100%	495.644.900
												Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kewenangan Keuda	100%	1.202.256.717.653

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja TW I, TW II, TW III, TW IV					Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/aktivitas pencapaian target indikator kinerja				TW I				
2	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	92%		92%		Mendorong terbitnya regulasi-regulasi terkait pengelolaan BMD					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kalitas Pengelolaan BMD	100%	1.079.472.729
		Persentase Penurunan Nilai Aset yang Bermasalah	75%	75%	75%	75%	Mewujudkan terlaksananya pembinaan terhadap penyusunan, penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menyelenggarakan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi pengelolaan BMD urusan pemerintah Provinsi					Pengelolaan BMD	Peningkatnya Kualitas Adm dan Pembinaan Pengelolaan BMD	100%	1.079.472.729
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB		Menyelenggarakan perumusan Bahan Renstra, renja, RKT, RKA, DPA, PK, Lakip, LKPJ di Lingkup Badan.						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Realisasi Penunjang Urusan	100%	15.879.037.518
						menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan									
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kapuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	20,3%	20,3%	20,3%	20,3%	Menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait kepegawaian, Umum dan Aset OPD					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	210.458.000
							Mendorong peningkatan kualitas pelayanan organisasi baik internal maupun eksternal								
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	12.252.510.879
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	27.887.500
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	2.204.711.428
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	618.407.594
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100%	276.906.817
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	100%	182.240.000
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	105.915.300
													Jumlah..		1.224.225.033.520

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Barat


ROSAIL AKHYAR, P.S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, Nip. 19800629 199810 1 001